



Pernyataan Sikap Lembaga Partisipasi Perempuan:

“Menuntut Negara Hadir dan Bertanggung Jawab dalam Memberikan Perlindungan bagi Perempuan, Etnis Minoritas dan Kelompok Minoritas Lainnya”.

Lembaga Partisipasi Perempuan prihatin atas jatuhnya korban lebih dari 500 terluka dan turut berbelasungkawa atas tujuh korban jiwa dalam gelombang demo tanggal 28-30 Agustus 2025 di Jakarta, Makassar, Solo dan Yogyakarta:

1. Affan Kurniawan
2. Syaiful
3. Muhammad Akbar Basri
4. Sarinawati
5. Rusdamdiansyah
6. Rheza Sedy Pratama
7. Sumari

Semoga para korban diterima di sisi Allah SWT dan keluarga diberikan kekuatan.

Kerusuhan yang mirip tragedi Mei 1998, sudah diramalkan sejak Prabowo dilantik menjadi Presiden, kabinet yang gemuk, UU TNI yang disahkan diam-diam dan menyebabkan saham jeblok, rupiah anjlok, dan beberapa investor batal masuk. Supremasi sipil yang dicerai dengan militer dan polisi yang menduduki berbagai jabatan sipil, rangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar Undang-undang, anggaran jumbo untuk militer dan polisi, namun di sisi lain menaikkan pajak rakyat untuk menggenjot pendapatan negara.

Pemerintah seolah tidak peduli perekonomian yang lesu, badai PHK dan sulitnya mencari pekerjaan, namun pemerintah justru berfoya-foya dengan fasilitas pejabat publik yang nilainya fantastis. Anggota DPR bahkan dinaikkan gajinya hampir 100%. Pemerintah rusak, berdampak ke parlemen yang congkak karena koalisi partai. PDIP yang satu-satunya partai oposisi tidak jelas sikapnya. Muak dan marah, memicu demo anarkis, korban berjatuh dan sasarannya adalah pejabat publik yang pernyataannya dinilai menyakiti hati rakyat.

Pada tahun 2005 dalam konferensi tingkat tinggi, PBB, dunia menyepakati diadopsinya prinsip global R2P (*Responsibility to Protect*) yaitu tanggung jawab dalam melindungi penduduk dari

genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.¹ R2P berangkat pada kesadaran dimana populasi tertentu sangat rentan dan tengah menghadapi resiko genosida, kejahatan perang, *ethnic cleansing* dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan instrumen R2P, negara-negara yang termasuk kategori beresiko adalah negara yang pernah mengalami:

1. Pelanggaran HAM berat di masa lalu.
2. Persekusi terhadap kelompok minoritas termasuk tindakan intoleransi.
3. SGBV (Sexual and Gender based violence) di masa konflik, termasuk perkosaan massal
4. Impunitas.

Dari indikator yang ada dalam instrumen R2P, Indonesia termasuk dalam negara yang beresiko besar terjadi pelanggaran HAM berat, karena Indonesia pernah punya pengalaman pelanggaran HAM berat di masa lalu yaitu kasus HAM 65 dan tragedi Mei 1998. Di Indonesia juga berulang kali terjadi kekerasan seksual berbasis gender di masa konflik, seperti di Aceh, Poso, Ambon, Atambua dan Papua, bahkan di Jakarta pada tragedi perkosaan massal Mei 1998.

Indonesia belum memiliki mekanisme untuk memotong mata rantai impunitas. Bahkan Undang-undang tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Ini menyebabkan kerentanan penduduk sipil semakin meningkat. Selain itu hampir setiap tahun terjadi kasus persekusi terhadap kelompok minoritas agama, kepercayaan dan kelompok minoritas seksual. Intoleransi meningkat dan negara tidak sepenuhnya hadir dalam kerentanan konflik tersebut. Masyarakat dibiarkan sendirian menghadapi pelanggaran HAM.

Tragedi Mei 1998 mengingatkan kita adanya kerusuhan massal dan ketidakhadiran aparat keamanan. Pemerintah harus belajar bahwa korban dan kerugian yang terbesar diderita oleh perempuan dan kelompok minoritas. Negara harus hadir dan memastikan tragedi Mei 1998 tidak terulang kembali. Masyarakat perlu saling menjaga dan tidak membiarkan persekusi dan kekerasan terjadi antar warga.

Jakarta 1 September 2025

Adriana Venny (Narahubung Lembaga Partisipasi Perempuan)

Email: partisipasiperempuan@gmail.com

IG: @lembagapartisipasiperempuan

Website: www.lembagapartisipasiperempuan.com

¹ <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/>